



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARIEF S. TRINUGROHO**
Jabatan : **Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara**
Selanjutnya disebut pihak pertama

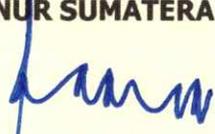
Nama : **EDY RAHMAYADI**
Jabatan : **Gubernur Sumatera Utara**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

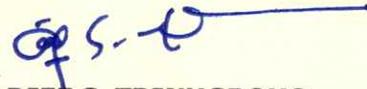
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, Januari 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR SUMATERA UTARA


EDY RAHMAYADI

Pihak Pertama,
**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**


ARIEF S. TRINUGROHO
Pembina Utama
NIP. 19641127 199003 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan	2 - 3
2	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas	Persentase kerjasama yang terealisasi	100%
3	Kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	100%
4	Proposal permohonan belanja hibah yang ditindaklanjuti	Persentase proposal hibah yang ditindaklanjuti	100%
5	Meningkatkan pelayanan penyusunan dan penyebarluasan informasi produk hukum daerah	Jumlah rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi	30 Perda/ Pergub
		Jumlah rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi	700 Perda/ Perkada
		Jumlah rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan naskah hukum lainnya yang dieksaminasi	850 produk hukum
		Jumlah produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum Biro Hukum Setdaprovsu	30 produk hukum
6	Meningkatkan pelayanan hukum dan perlindungan HAM dalam menangani permasalahan hukum di lingkungan Pemprovsu dan masyarakat	Jumlah penanganan perkara Pemprovsu di pengadilan	25 perkara
		Jumlah tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat	15 kasus

7	Mewujudkan dukungan kebijakan lingkup perekonomian daerah	Persentase perumusan kebijakan lingkup perekonomian yang diimplementasikan	100%
		Persentase BUMD dan BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi dan kinerja keuangan yang sehat	100%
8	Mewujudkan proses dan pelayanan/layanan pengadaan secara elektronik yang transparan dan akuntabel serta terstandar	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa	100%
		Pemenuhan 17 standarisasi LPSE	17 Standarisasi
9	Mewujudkan kualitas manajemen administrasi pembangunan yang profesional	Jumlah kebijakan yang dirumuskan dan digunakan dalam pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan Daerah	20 Kebijakan
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan melalui aplikasi	100%
10	Meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Indeks Pelayanan Publik	4,2 (A-)
		Persentase kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%
		Nilai capaian pelaporan kinerja	15
11	Meningkatnya fasilitasi pelayanan kegiatan pimpinan daerah	Persentase fasillitasi pelayanan kerumahtanggaan pimpinan	100%
12	Meningkatnya pemanfaatan gedung dan mess Pemprov	Persentase kontribusi PAD dari pemanfaatan pelayanan gedung dan mess Pemprov	100%
13	Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Materi Pimpinan	100%
		Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	100%

Program	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 517.565.263.383,-
2 Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp. 6.056.000.000,-
3 Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 2.966.045.300,-
4 Program Kesejahteraan Rakyat	Rp. 555.119.727.525,-
5 Program Penataan Organisasi	Rp. 3.716.101.500,-
6 Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 178.630.048.479,-
7 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp. 5.709.948.224,-
8 Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 3.386.609.604,-
Total	Rp. 1.273.149.744.015,-

Medan, Januari 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR SUMATERA UTARA

EDY RAHMAYADI

Pihak Pertama,
**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

ARIEF S. TRINUGROHO
Pembina Utama
NIP. 19641127 199003 1 002